

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, f. (2018). *Pengaruh faktor-faktor pengendalian internal terhadap akuntabilitas auditor di inspektorat kota surakarta.*
- Bpk ri jawa tengah. (2020). *Buku profil badan pemeriksa keuangan perwakilan provinsi jawa tengah* (issue 175). <https://jateng.bpk.go.id/profil-bpk-perwakilan/>
- Coso. (2013). *Coso internal control – integrated framework (2013) - kpmg.* 1–8.
- Donaldson, l., & davis, j. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: *australian journal of management*, 16(june 1991), 49–66.  
<http://aum.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/031289629101600103>
- Firman, hakim, t. (2021). *Pengaruh manajemen pelayanan terhadap kinerja pegawai di kantor sekretariat dewan kabupaten enrekang. 2.*
- Fitrawati, abdul, k., & muh, i. (2019). *Pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( survei pada satuan kerja perangkat daerah ( skpd ) kabupaten parigi moutong ).* 177–184.
- Ghozali, i. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 23.*
- Habibi, f., & nugroho, a. (2018). Penerapan dimensi akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi dana desa di kabupaten pandeglang. *Jurnal ilmu administrasi: media pengembangan ilmu dan praktek administrasi*, 15(2), 197–211.  
<https://doi.org/10.31113/jia.v15i2.161>
- Harjaningrum, e. A. (2021). Analisis penerapan akuntabilitas keuangan, pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi*, 10(1), 1–25.
- Instruksi presiden republik indonesia. (1999). *Instruksi presiden no 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.*
- Ludfa, f., siti, m., & whedy, p. (2017). Pengaruh faktor-faktor pengendalian internal terhadap akuntabilitas auditor di inspektorat kabupaten jombang. *Unej e-proceeding, 2017*(seminar nasional ekonomi dan bisnis (snaper-ebis 2017) fakultas ekonomi dan bisnis universitas jembe), 1–11.  
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6650>
- Mahsun, m. (2006). *Pengukuran kinerja sektor publik: cetakan pertama. Yogyakarta: penerbit bpfe-yogyakarta.*
- Mardiasmo, d., & mba, a. (2009). *Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: andi.*
- Mardiono, e., pinasti, m., & purwati, a. S. (2017). *Determinan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten / kota.* 1–33.
- Martini, r., naufal, l., sukmini, h., zulkifli, z., & endah, w. (2019). *Sistem pengendalian intern*

- pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di kecamatan sembawa. *Jurnal akademi akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Perpres. (2014). *Akuntabilitas instansi pemerintah daerah berdasarkan peraturan presiden republik indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah* (vol. 6, issue 10).
- Savila. (2021). *Pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, kompetensi aparat pemerintah, dan kepatuhan regulasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah*.
- Sekretariat negara ri. (2008). *Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah* (vol. 76, issue 3).
- Siregar, a. (2019). *Peran kepemimpinan dalam peningkatan kinerja pegawai kantor camat sidikalang kabupaten dairi*. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13605>
- Strickland, r. A., & vaughan, s. K. (2008). The hierarchy of ethical values in nonprofit organizations: a framework for an ethical, self-actualized organizational culture. *Public integrity*, 10(3), 233–252. <https://doi.org/10.2753/pin1099-9922100303>
- Sugiyono, s. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, r&d*. Bandung: alfabeta.
- Taufiq, a. R. (2019). Penerapan standar operasional prosedur (sop) dan akuntabilitas kinerja rumah sakit. *Jurnal profita*, 12(1), 56. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.005>
- Wulandari, n. D. (2021). Pengaruh penerapan metode akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan kegiatan pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan di kantor kecamatan kota medan. *Juripol*, 4(1), 128–137. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.1098>